

## OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN RPTRA BERBASIS INKLUSI SOSIAL UNTUK MASYARAKAT KEPULAUAN SERIBU

**Dian Novita Fitriani, Niswa Nabila Sri Bintang Alam**

Perpustakaan Nasional RI

dian.novita.f@gmail.com, niswa.alam@gmail.com

Disubmit: 14 Juni 2019 | Direview: 20 Juni 2019 | Diterima: 24 Juni 2019

### ABSTRACT

Various RPTRA library activities are currently only focused on serving children. Even though the RPTRA library has the potential to be a solution to the conditions of social exclusion in the Thousand Islands Administrative District community. The purpose of this research is to identify the condition of the Thousand Islands community, to know the role of the RPTRA library for the Thousand Islands community, and to formulate an optimization of the RPTRA library based on social inclusion for the Thousand Islands community. The research method used is descriptive qualitative ethnographic critical approach. The data in this study are still preliminary data. Data collection was carried out through participant observation for 7 days on Untung Jawa Island and interviews. The technique for determining informants is purposive sampling. This study resulted in the identification of the condition of the Thousand Islands as a small archipelago region with minimal transportation, means of communication made the Thousand Islands isolated with other regions. In addition, poverty rates in the Thousand Islands show the highest compared to other regencies / cities. Whereas HDI shows the lowest number. This shows that the Thousand Islands community experienced social exclusion. The RPTRA library is still focused on children. Even though one of the RPTRA's visions is to improve the community's economy. The formula for optimizing the RPTRA library is to become a social inclusion-based library in order to achieve public welfare and achieve the full RPTRA vision.

### ABSTRAK

Berbagai kegiatan perpustakaan RPTRA saat ini hanya fokus melayani anak-anak. Padahal perpustakaan RPTRA memiliki potensi untuk menjadi solusi dari kondisi eksklusi sosial pada masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat Kepulauan Seribu, mengetahui peran perpustakaan RPTRA bagi masyarakat Kepulauan Seribu, dan merumuskan optimalisasi perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi kritis. Data dalam penelitian ini masih berupa preliminary data. Pengambilan data dilakukan melalui observasi partisipan selama 7 hari di Pulau Untung Jawa dan wawancara. Teknik penentuan informan adalah purposive sampling. Penelitian ini menghasilkan identifikasi kondisi Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan kecil dengan minimnya transportasi, sarana komunikasi membuat Kepulauan Seribu terisolir dengan Kawasan lainnya. Selain itu, angka kemiskinan di Kepulauan Seribu menunjukkan angka tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain. Sedangkan IPM menunjukkan angka terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kepulauan Seribu mengalami eksklusi sosial. Perpustakaan RPTRA masih fokus pada anak-anak. Padahal salah satu visi RPTRA adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Rumusan optimalisasi perpustakaan RPTRA adalah menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan tercapainya visi RPTRA secara penuh.

**Keywords:** Library; RPTRA; Social Inclusion; Social Exclusion.

### PENDAHULUAN

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang juga kota terbesar di Indonesia. DKI Jakarta memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus Ibukota setingkat provinsi dan dipimpin oleh gubernur. Dengan luas wilayah sekitar 661, 52 km<sup>2</sup> (lautan: 6.997, 5 km<sup>2</sup>), DKI Jakarta dibagi menjadi satu kabupaten administrasi dan lima kota administrasi. Satu kabupaten administrasi yaitu kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, sedangkan kota administrasi meliputi kota administrasi Jakarta Pusat, kota administrasi Jakarta Utara, kota administrasi Jakarta Barat, kota administrasi Jakarta Selatan dan kota administrasi Jakarta Timur.

Salah satu wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari gugusan kepulauan adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pusat pemerintahan Kepulauan Seribu terletak di Pulau Pramuka sejak 2003. Kepulauan seribu terbagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Seribu

Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kepulauan seribu memiliki pulau sekitar 342 pulau termasuk pulau pasir dan terumbu karang. Tidak semua pulau tersebut berpenghuni. Sebelas pulau yang berpenghuni diantaranya Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung Besar, Pulau Tidung Kecil, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Sebira. Sedangkan pulau yang tak berpenghuni dan dijadikan sebagai pulau wisata seperti Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kotok Besar, Pulau Puteri, Pulau Matahari, Pulau Sepa, dan sebagainya.

Penduduk di wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu berasal dari penduduk pendatang. Penduduk pendatang berasal dari orang-orang Banten, Sulawesi Selatan seperti Bugis, Mandar, dan sebagian kecil dari Kalimantan serta Bangka Belitung. Berdasarkan laporan kontrolir Belanda pada tahun 1924, orang asli orang Pulo didominasi orang Bugis dan Banten. Namun Pak Amrullah selaku pamong kelurahan Pulau Panggang meyakini bahwa penduduk Kepulauan Seribu pada awalnya didominasi oleh masyarakat dari Banten dan suku Mandar, Kalimantan (Irsyad, 2012).

Masyarakat Pulau Seribu dipercaya mulai terbentuk di Pulau Panggang. Setelah pemukiman di Pulau Seribu meluas, penduduk menyebar dari satu pulau ke pulau lain, seperti pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Kelapa, dan pulau-pulau lainnya. Bagi penduduk Pulau Panggang maupun pulau-pulau di Kepulauan Seribu disebut sebagai Orang Pulo. Mereka akan secara lugas menyebut sebagai orang pulo kepada orang “darat” dan “tamu”. Sebutan “darat” ditujukan untuk orang-orang wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk wilayah Pesisir Utara Pulau Jawa dari Teluk Banten hingga ke daerah sekitar Muara Sungai Citarum. Sebutan “tamu” ditujukan untuk siapa saja yang datang ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu termasuk wisatawan (Irsyad, 2012).

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pendudukan di Kepulauan Seribu adalah 23.901 orang. Dengan jumlah penduduk tersebut, angka kemiskinan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2018, pada tahun 2013-2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan angka sebesar 12,96%, tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

Dari penjabaran data-data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Kemiskinan selama ini telah menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan di Indonesia. Meskipun sudah banyak proyek dan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, kemiskinan tetap menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan.

Dalam hal pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan angka paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Adanya kesenjangan persentase IPM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta dapat menimbulkan deprivasi dari masyarakat Pulau Seribu. Deprivasi sendiri merupakan keadaan psikologis di mana seseorang merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan secara subyektif antara dirinya dengan kelompok lain. Deprivasi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan karena rasa ketidakpuasan (Brown dalam Mendatu, 2012 dalam Ardiansyah, 2013).

Dalam perkembangannya, muncullah konsep eksklusi sosial atau pengucilan sosial yang pertama kali dicetuskan oleh Lenoir. Konsep eksklusi sosial Lenoir telah menjadi sebuah paradigma kerangka berpikir yang lebih komprehensif untuk memahami deprivasi dan kemiskinan. Banyak pemikir sosial dari berbagai negara melakukan pengkajian tentang proses terjadinya deprivasi dan kemiskinan melalui perspektif eksklusi sosial. Untuk memahami proses deprivasi dan pemiskinan di berbagai negara, badan-badan internasional seperti ILO dan UNDP juga mengadopsi konsep eksklusi sosial (ILO, 1995 dalam Syahra, 2010). Oleh karena itu, konsep eksklusi sosial dapat dijadikan payung besar untuk memahami deprivasi dan pemiskinan.

Seiring berkembangnya konsep eksklusi sosial, muncul konsep inklusi sosial yang menjadi solusi dari permasalahan eksklusi sosial. Inklusi sosial harus menjadi perhatian dari berbagai sektor misalnya

pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu lembaga yang perlu memastikan inklusi sosial masuk ke layanan adalah perpustakaan, khususnya perpustakaan umum. Sehingga perpustakaan dapat berkontribusi dalam upaya untuk mengatasi eksklusivitas sosial. Jika masyarakat dikecualikan dari layanan perpustakaan, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan informasi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan pekerjaan, pendidikan atau menggunakan layanan pemerintah dan kesehatan (Fourie, 2007).

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki fasilitas kegiatan masyarakat yang terbatas. Fasilitas kegiatan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2017 terdiri dari RPTRA, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan Kampung KB. Salah satu fasilitas di RPTRA adalah layanan perpustakaan. Dalam penelitian sebelumnya, Wiguna dan Salim (2018) mengungkapkan bahwa perpustakaan RPTRA mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencapai visi ASEAN 2020. Perpustakaan RPTRA memiliki berbagai aktivitas edukasi diantaranya; bimbingan belajar, kesenian, *story telling*, permainan edukasi, permainan tradisional, olahraga, bimbingan konseling, praktik menanam tanaman obat-obatan dan pemberian nutrisi kepada anak-anak.

Berbagai kegiatan perpustakaan RPTRA saat ini hanya fokus melayani anak-anak. Padahal perpustakaan RPTRA memiliki potensi untuk menjadi solusi dari kondisi eksklusivitas sosial pada masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian peran RPTRA dan optimalisasi RPTRA berbasis inklusi sosial untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kepulauan Seribu yang mengalami eksklusivitas sosial?
2. Bagaimana peran perpustakaan RPTRA bagi masyarakat Kepulauan Seribu?
3. Bagaimana optimalisasi perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial untuk masyarakat Kepulauan Seribu yang mengalami eksklusivitas sosial?

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengidentifikasi kondisi masyarakat Kepulauan Seribu yang mengalami eksklusivitas sosial, 2) mengetahui peran perpustakaan RPTRA bagi masyarakat Kepulauan Seribu dan 3) merumuskan optimalisasi perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi pengembangan perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial.

### **Inklusi Sosial**

Istilah inklusi sosial atau keterlibatan sosial mulai digunakan kembali pada abad ke-19 setelah diangkat oleh seorang sosiolog, Max Weber. Dalam hal sejarah yang lebih baru, istilah ini lebih mudah diidentifikasi melalui anonimnya, eksklusivitas sosial. Eksklusivitas sosial ialah proses di mana individu atau kelompok dikecualikan seluruhnya atau sebagian dari partisipasi penuh dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan kemiskinan namun sebenarnya eksklusivitas sosial memiliki arti yang lebih luas. Hal ini mendorong lahirnya konsep inklusi sosial. Salah satu pendapat paling populer tentang konsep inklusi sosial adalah konsep ini memperhitungkan lebih banyak dimensi kehidupan manusia daripada konsep kemiskinan (Aasland dan Flotten, 2001). Fenomena multidimensi yang dapat dikatakan sebagai eksklusivitas sosial adalah mereka yang mengalami pengecualian dari; 1) hak kewarganegaraan formal, 2) pasar tenaga kerja, 3) partisipasi dalam masyarakat sipil, 4) arena sosial. Pengucilan dari semua arena tersebut diukur dari tingkat partisipasinya dan hubungan antara satu arena dengan lainnya juga perlu diperhatikan (Aasland dan Flotten, 2001). Serangkaian masalah yang terjadi dalam konsep eksklusivitas sosial seperti pengangguran, diskriminasi, ketrampilan yang buruk, perumahan yang buruk, kondisi kesehatan yang buruk, dll. Kondisi lain yang dapat dikategorikan ke dalam eksklusivitas sosial adalah adanya pengucilan dari informasi dan akses ke informasi (Fourie, 2007).

Inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas. Sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini termasuk faktor-faktor seperti koneksi dengan orang lain, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan akses ke layanan yang mempromosikan kesejahteraan (Lloyd, Lipu & Kennan 2010). Inklusi sosial merupakan proses yang memastikan bahwa orang-orang yang beresiko kemiskinan dan pengucilan sosial memiliki peluang dan sumber daya yang

diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam hal ekonomi, sosial dan budaya untuk mendapatkan standar hidup dan kesejahteraan seperti masyarakat pada umumnya (Milcher e Ivanov, 2008). Dalam MIDIS (2004) menambahkan bahwa dalam inklusi sosial harus dipastikan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, dapat menggunakan hak mereka, memanfaatkan kemampuan mereka dan memanfaatkan peluang yang ada. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia (2019) mendefinisikan inklusi sosial sebagai: 1) proses meningkatkan persyaratan bagi individu dan kelompok untuk mengambil bagian dalam masyarakat, dan 2) proses peningkatan kemampuan, peluang dan martabat masyarakat yang dirugikan identitas untuk mengambil bagian dalam masyarakat.

Area inklusi sosial berkaitan dengan berbagai bidang pengelompokan sosial, termasuk diferensiasi demografis yang meliputi; sosial ekonomi, budaya dan bahasa utama (termasuk kelompok asli), agama, geografi (termasuk daerah pedesaan dan/atau daerah terpencil), gender dan orientasi seksual, usia (termasuk kelompok pemuda dan senior), kesehatan (termasuk cacat fisik dan mental), pengangguran, tuna wisma, dan tahanan (Gidley, et.al, 2010)

Inklusi sosial mengacu pada sejauh mana seseorang dapat mengakses semua yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara penuh dan positif dalam masyarakat. Ini termasuk faktor-faktor seperti koneksi dengan orang lain, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan akses ke layanan yang mempromosikan kesejahteraan (Lloyd, Lipu & Kennan 2010).

### **Perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak**

Perpustakaan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) adalah bagian dari program RPTRA. RPTRA adalah salah satu program pemerintah DKI Jakarta yang mulai berjalan tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, RPTRA didefinisikan sebagai tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program Pokok pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak (KLA).

Visi dari RPTRA adalah untuk mencapai masyarakat Jakarta yang terpadu, humanis dan berperilaku positif. Sedangkan misinya adalah mencapai kota layak anak. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, RPTRA memiliki tujuan diantaranya; 1) mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA), 2) Meningkatkan sarana dan prasarana interaksi sosial warga, 3) mengimplementasikan 10 program PKK dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader PKK dan masyarakat, 4) meningkatkan RTH dan penyerapan air tanah, dan 5) meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar RPTRA. RPTRA juga memberikan beberapa manfaat, diantara; 1) memenuhi hak anak (hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi), 2) Kelanjutan dari pembangunan RPTRA memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkembangkan partisipasi, 3) Membangun perekonomian masyarakat dengan stabilitas pangan melalui RPTRA, 4) Sebagai sarana interaksi sosial masyarakat (DKI Jakarta, 2017).

Pembangunan RPTRA dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan ruang publik sehingga anak-anak bermain di tempat-tempat yang tidak layak. Sehingga pembangunan RPTRA ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan anak. Namun pada dasarnya RPTRA juga harus mewadahi kebutuhan keluarga dari berbagai kalangan usia mulai dari balita hingga lansia. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016, RPTRA memiliki layanan sebagai berikut:

- a. Layanan anak yang terdiri dari; bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD), pos pelayanan terpadu (posyandu), perpustakaan anak, tempat berolah raga, tempat bermain dan kegiatan kreatif anak.
- b. Layanan masyarakat yang terdiri dari; kegiatan 10 program PKK, PKK Mart, kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada, olahraga, dan kegiatan kesenian.
- c. Layanan kebencanaan terdiri dari komunikasi, informasi, edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara layanan pasca bencana, komunikasi informasi, dan edukasi bencana serta rambu bencana.

Untuk mendukung berbagai layanan diatas, RPTRA memiliki berbagai fasilitas, yaitu; jogging track, terapi track, ruang bermain, perpustakaan, ruang serbaguna, toilet, PKK Mart, lapangan, kolam gizi, dan ruang laktasi (DKI Jakarta, 2017).

Pembangunan RPTRA dilakukan dengan menggunakan dana CSR perusahaan maupun dana dari pemerintah. RPTRA dibangun di lahan dan asset Pemprov DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Meskipun beberapa RPTRA didanai penuh oleh pihak korporasi, pengawasan tetap dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Rincian dukungan pembiayaan RPTRA pada masing-masing kota dirinci sebagai berikut;

**Tabel 1. Dukungan Pembiayaan Pembangunan RPTRA (DKI Jakarta, 207)**

No.	Kota Administrasi	Dukungan Pembiayaan	
		APBD	CSR
1	Jakarta Barat	44	12
2	Jakarta Pusat	51	13
3	Jakarta Timur	49	11
4	Jakarta Selatan	44	15
5	Jakarta Utara	50	14
6	Kepulauan Seribu	5	2
<b>TOTAL</b>		<b>225</b>	<b>67</b>

Dalam perencanaannya, pembangunan RPTRA melibatkan masyarakat masyarakat sehingga mampu menciptakan rasa memiliki pada penduduk lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaan RPTRA.

Di setiap RPTRA terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola RPTRA tersebut. Petugas tersebut disebut sebagai pasukan pink RPTRA. Tugas dan Fungsi petugas tersebut diantaranya adalah; 1) melakukan inventarisasi dan mengusulkan rencana kebutuhan dan kegiatan RPTRA kepada pengurus tingkat kelurahan, 2) melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA yang berkualitas dan memuaskan pengunjung RPTRA, 3) memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA, 4) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA, 5) membuka dan menutup fasilitas RPTRA, 6) menjaga prasarana dan sarana RPTRA, 7) memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA, 7) memfasilitasi kegiatan lintas sector, dan 8) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan harian dan bulanan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat kelurahan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Rusaini, 2015). Sedangkan Menurut Bungin (2012) penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau suatu objek tertentu dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang masyarakat Kepulauan Seribu dan peran perpustakaan RPTRA bagi mereka.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografis kritis. Etnografis kritis adalah satu jenis riset etnografis di mana penulisnya memperjuangkan emansipasi bagi kelompok suatu masyarakat tertentu yang terpinggirkan (Thomas, 1993 dalam Creswell, 2018). Komponen utama dari etnografis kritis adalah orientasi bermuatan nilai, memberdayakan masyarakat dengan memberikan otoritas, menentang status quo, dan mengemukakan persoalan tentang kekuasaan dan mengemukakan persoalan tentang kekuasaan dan kontrol. Dalam penelitian ini, peneliti memperjuangkan kesetaraan masyarakat Kepulauan Seribu dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipan selama 7 hari di Pulau Untung Jawa, salah satu bagian dari Kepulauan Seribu. Observasi partisipan yang dimaksudkan dilakukan dengan peneliti terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari suatu masyarakat, mengamati, mewawancarai para partisipan dalam kelompok tersebut. Teknik penentuan informan dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling dengan kriteria; 1) masyarakat Kepulauan Seribu, 2) Petugas RPTRA. Selama observasi, peneliti melakukan wawancara kepada petugas RPTRA Amiterdarm (Pulau Untung Jawa) dan masyarakat Pulau Untung Jawa dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara ke petugas RPTRA dari Arung Palakka (Pulau Kelapa Dua) dan RPTRA Nyiur Melambai (Pulau Kelapa).

Data primer didapatkan dari observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari data statistic dan studi pustaka. Data dari lapangan kemudian diolah. Tujuan pengelolaan data adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikan data dalam susunanyangrapidan baik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles dan Huberman. Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Muhammad Idrus, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah DKI Jakarta per tahun 2017 telah membangun 290 RPTRA. RPTRA tersebut tersebar di seluruh wilayah provinsi DKI Jakarta termasuk di wilayah Kepulauan Seribu, dengan rincian; 1) Jakarta Pusat: 44 RPTRA, 2) Jakarta Utara: 64 RPTRA, 3) Jakarta Barat: 56, 4) Jakarta Selatan: 59 RPTRA dan 5) Kepulauan Seribu: 7 RPTRA (DKI Jakarta, 2017). Untuk di Kepulauan Seribu, pada tahun 2019 diresmikan satu RPTRA di pulau Sabira dengan nama RPTRA “Jaga Utara”. Untuk nama RPTRA di kepulauan seribu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 Daftar Nama RPTRA di Kepulauan Seribu**

No.	Pulau	Nama RPTRA
1	Untung Jawa	RPTRA Amiterdarm
2	Pramuka	RPTRA Tanjung Elang Berseri
3	Tidung	RPTRA Tidung Ceria
4	Pari	RPTRA Klanceng Putih
5	Kelapa	RPTRA Nyiur Melambai
6	Kelapa Dua	RPTRA Arung Palakka
7	Panggung	RPTRA Tanjong Timur
8	Sabira	RPTRA Jaga Utara

### Kondisi Masyarakat Kepulauan Seribu

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah penduduk di Kepulauan Seribu adalah 23.901 orang yang terdiri dari 9.927 orang di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan 13.974 orang di Kepulauan Seribu Utara. Dengan kepadatan luas wilayah sebesar 8,70 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kepulauan Seribu mencapai 2,717 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2 Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2017 (BPS Kepulauan Seribu, 2018)**

Kecamatan District	Luas / Area (Km <sup>2</sup> )	Penduduk Population (Orang/Person)	Kepadatan Penduduk Population Density (Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	3,05	9.927	3.196
Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	5,65	13.974	2.458
Jumlah / Total	8,70	23,901	2.717

Sumber / Source : Proyeksi Penduduk

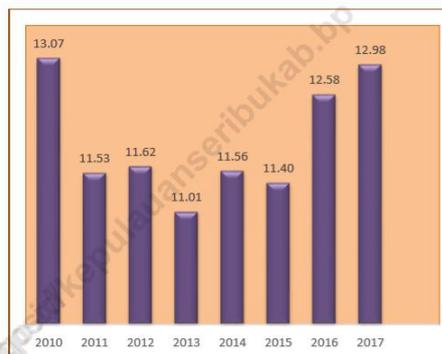
Dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk diatas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, angka kemiskinannya tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2018, pada tahun 2013-2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan angka sebesar 12,96%. Kota yang menduduki tertinggi kedua adalah Kota Jakarta Utara sebesar 5,59 %. Sedangkan rata-rata persentase kemiskinan di kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3 %.

**Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta 2013-2017 (BPS Kepulauan Seribu, 2018)**

Kabupaten/Kota Administrasi Regency/ Municipality	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	11,01	11,60	11,40	12,58	12,98
Jakarta Selatan	3,47	3,70	3,41	3,27	3,14
Jakarta Timur	3,10	3,42	3,24	3,19	3,31
Jakarta Pusat	3,70	4,13	4,16	3,91	3,78
Jakarta Barat	3,46	3,70	3,64	3,38	3,45
Jakarta Utara	5,30	5,98	5,91	5,57	5,59

Sumber / Source : BPS Provinsi DKI Jakarta / BPS Statistics

Menurut data BPS DKI Jakarta tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 11,40 %, mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 12,58 % dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2017 sebesar 12,98 %.



Sumber/Source : susenas

**Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin tahun 2010-2017 (BPS Kepulauan Seribu, 2018)**

Dari penjabaran data-data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Kemiskinan selama ini telah menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan di Indonesia. Meskipun sudah banyak proyek dan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, kemiskinan tetap menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan.

Dalam hal pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan angka paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta. IPM di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan angka 70,11 %. Sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi DKI Jakarta sebesar 80%.

**Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2013-2017 (BPS Kepulauan Seribu, 2018)**

Kabupaten/Kota Administrasi	2013	2014	2015	2016	2017	
Regency/ Municipality	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	67.62	68.48	68.84	69.52	70.11	
Jakarta Selatan	82.72	82.94	83.37	83.94	84.13	
Jakarta Timur	79.88	80.40	80.73	81.28	81.61	
Jakarta Pusat	78.81	79.03	79.69	80.22	80.49	
Jakarta Barat	78.79	79.38	79.72	80.34	80.47	
Jakarta Utara	77.16	77.29	78.30	78.78	79.47	

Tingkat kesejahteraan menurut IPM dilihat dari tiga komponen, yaitu; 1) usia yang panjang dan hidup yang sehat, 2) akses terhadap pengetahuan, 3) standar kehidupan ekonomi yang layak diukur dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita. Dalam laporan tahunan UNDP tahun 2010, IPM merupakan unsur strategis dalam pendekatan baru dalam pembangunan, yang sebelumnya hanya menekankan tingkat pencapaian di bidang ekonomi yang diukur dengan GDP (UNDP, 2010 dalam Syahra, 2010). Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam hal IPM, pemerintah DKI Jakarta kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Adanya kesenjangan persentase IPM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta dapat menimbulkan deprivasi dari masyarakat Pulau Seribu. Deprivasi sendiri merupakan keadaan psikologis di mana seseorang merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan secara subyektif antara dirinya dengan kelompok lain. Deprivasi dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan karena rasa ketidakpuasan (Brown dalam Mendatu, 2012).

Dalam perkembangannya, muncullah konsep eksklusi sosial atau pengucilan sosial yang pertama kali dicetuskan oleh Lenoir. Konsep eksklusi sosial Lenoir telah menjadi sebuah paradigma kerangka berpikir yang lebih komprehensif untuk memahami deprivasi dan kemiskinan. Banyak pemikir sosial dari berbagai negara melakukan pengkajian tentang proses terjadinya deprivasi dan kemiskinan melalui perspektif eksklusi sosial. Untuk memahami proses deprivasi dan pemiskinan di berbagai negara, badan-badan internasional seperti ILO dan UNDP juga mengadopsi konsep eksklusi sosial (ILO, 1995 dalam Syahra, 2010). Oleh karena itu, konsep eksklusi sosial dapat dijadikan payung besar untuk memahami deprivasi dan pemiskinan.

Eksklusi sosial atau pengucilan sosial seringkali diartikan sebagai kemiskinan. Eksklusi sosial seringkali dikaitkan dengan kemiskinan, namun sebenarnya eksklusi sosial memiliki arti yang lebih luas. Salah satu pendapat paling populer tentang konsep eksklusi sosial adalah konsep ini memperhitungkan lebih banyak dimensi kehidupan manusia daripada konsep kemiskinan (Aasland dan Flotten, 2000: 1027). Fenomena multidimensi yang dapat dikatakan sebagai eksklusi sosial adalah mereka yang mengalami pengecualian dari; 1) hak kewarganegaraan formal, 2) pasar tenaga kerja, 3) partisipasi dalam masyarakat sipil, 4) arena sosial. Pengucilan dari semua arena tersebut diukur dari tingkat partisipasinya dan hubungan antara satu arena dengan lainnya juga perlu diperhatikan (Aasland dan Flotten, 2000: 1028). Serangkaian masalah yang terjadi dalam konsep eksklusi sosial seperti pengangguran, diskriminasi, ketrampilan yang buruk, perumahan yang buruk, kondisi kesehatan yang buruk, dll. Kondisi lain yang dapat dikategorikan ke dalam eksklusi sosial adalah adanya pengucilan dari informasi dan akses ke informasi (Fourie, 2007).

Room (1995 dalam Dean, 2016) menggambarkan pengucilan sosial sebagai proses terlepas dari organisasi atau komunitas, tempat terbentuknya masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban. Pengucilan sosial berfokus pada masalah sejauh mana individu terikat menjadi anggota komunitas nasional, sehingga terbuka untuk dianalisis distribusi dan realisasi hak-hak sosial. Ketika warga negara tidak dapat mempertahankan hak-hak sosial mereka, mereka akan cenderung mengalami proses kerugian yang bersifat umum dan berlangsung lama sehingga partisipasi sosial dan pekerjaan mereka dapat dirusak. Selain itu,

kerugian umum dapat terjadi juga dalam hal pendidikan, pelatihan, pekerjaan, perumahan, sumber daya, keuangan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa eksklusi sosial adalah adanya perbedaan dalam distribusi peluang hidup.

Selain dalam hal deprivasi dan kemiskinan, eksklusi sosial pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga terjadi akibat minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi sehingga menyebabkan Kepulauan Seribu ‘terisolir’ dari Kawasan lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengalami kendala yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana serta persebaran penduduk yang tidak merata. Minimnya sarana dan prasarana tercermin dari terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu. Fasilitas kegiatan masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2017 terdiri dari RPTRA, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan Kampung KB. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki 7 RPTRA, 8 Pusat Informasi Konseling Remaja dan 3 Kampung KB yang tersebar di berbagai pulau di Kepulauan Seribu Selatan dan Utara (BPS, 2018).

**Tabel 5. Jumlah Fasilitas Kegiatan masyarakat menurut Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, 2017 (BPS Kepulauan Seribu, 2018)**

Kecamatan District	Fasilitas Kegiatan Masyarakat		
	RPTRA	Pusat Informasi Konseling Remaja	Kampung KB
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu Selatan	3	5	2
Kepulauan Seribu Utara	4	3	1
Jumlah	7	8	3

### **Peran Perpustakaan RPTRA untuk Masyarakat Kepulauan Seribu**

RPTRA merupakan salah satu program pemerintah DKI Jakarta berupa tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga. Operasional dan perawatan RPTRA dilakukan dengan bekerja sama dan kolaborasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu fasilitas yang terdapat di RPTRA adalah perpustakaan. SKPD yang bertanggungjawab dalam operasional dan perawatan perpustakaan RPTRA adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinasikan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota setempat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyiapkan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak-anak dan menyiapkan buku-buku bacaan yang mendidik dan informatif untuk anak-anak.

Perpustakaan RPTRA juga memiliki berbagai program lebih dikhususkan untuk anak-anak, seperti bimbingan belajar, kesenian, *story telling*, permainan edukasi, permainan tradisional, olahraga, bimbingan konseling, praktik menanam tanaman obat-obatan dan pemberian nutrisi kepada anak-anak. Salah satu kegiatan di RPTRA Arung Palakka, Pulau Kelapa Dua, adalah kegiatan bercerita yang akan diadakan 18-19 Juni 2019. Seringkali RPTRA juga bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lain baik dari dalam maupun luar pulau untuk mengadakan kegiatan. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan RPTRA Amterdarm dengan peserta ENJ (Ekspedisi Nusantara Jaya) adalah pendidikan pengguna di perpustakaan RPTRA yang kemudian dilanjutkan dengan membaca dan menceritakan kembali buku bacaan yang diikuti siswa SD Pulau Untung Jawa.

Koleksi perpustakaan RPTRA sebagian besar terdiri koleksi untuk anak-anak. Kondisi koleksi perpustakaan RPTRA pada masing-masing pulau di Kepulauan Seribu berbeda antara satu dengan lainnya. RPTRA Arung Palakka memiliki hanya memiliki koleksi sekitar 50 eksemplar, sedangkan RPTRA Amterdarm memiliki koleksi 1.814 eksemplar. Koleksi tersebut didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hibah dari berbagai pihak, seperti mahasiswa KKN. Seperti misalnya perpustakaan RPTRA Arung Palakka hanya mendapatkan koleksi perpustakaan dari hibah mahasiswa yang sedang KKN. Sedangkan koleksi perpustakaan RPTRA

Amiterdarm didapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan juga hibah dari berbagai pihak, misalnya dari perusahaan, komunitas, perguruan tinggi dan bahkan hibah dari negara lain.

Pembangunan RPTRA dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan ruang publik sehingga anak-anak bermain di tempat-tempat yang tidak layak. Sehingga pembangunan RPTRA ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan anak. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RPTRA lebih fokus untuk anak-anak. Hal ini juga diungkapkan oleh petugas RPTRA dana hasil observasi di lapangan. Dari hasil observasi juga menunjukkan yang sering berkunjung ke RPTRA adalah anak-anak. Biasanya sepulang dari sekolah atau seringkali pada jam sekolah, karena sekolah bekerja sama dengan RPTRA untuk melaksanakan kegiatan. Dalam salah satu visi RPTRA adalah mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) sehingga kegiatan-kegiatan RPTRA mengacu pada program-program KLA yang diintegrasikan dengan 10 program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

### **Optimalisasi Perpustakaan RPTRA**

Secara administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki luas wilayah 8,70 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 2 kecamatan dengan 6 kelurahan dan 110 pulau. Dengan kondisi wilayah berupa kepulauan kecil dan minimnya sarana transportasi serta telekomunikasi, membuat Kepulauan Seribu ‘terisolir’ dari kawasan lainnya di DKI Jakarta. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana, serta persebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2018). Kondisi tersebut juga yang menjadikan adanya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi di DKI Jakarta. Kesenjangan ini dapat menimbulkan depivasi. Selain itu, tingkat kemiskinan masyarakat di Kepulauan Seribu juga menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Deprivasi dan kemiskinan dapat dipahami dengan menggunakan konsep eksklusi sosial. Badan-badan internasional seperti ILO dan UNDP juga mengadopsi konsep eksklusi sosial untuk memahami proses deprivasi dan pemiskinan di berbagai negara (ILO, 1995 dalam Syahra, 2010). Room (1995) menggambarkan eksklusi sosial atau pengucilan sosial sebagai proses terlepas dari organisasi atau komunitas, tempat terbentuknya masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban. Pengucilan sosial berfokus pada masalah sejauh mana individu terikat menjadi anggota komunitas nasional. Pengucilan sosial masyarakat Kepulauan Seribu dapat disebabkan karena wilayah Kepulauan Seribu yang terisolir karena berbentuk kepulauan serta minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi.

Konsep inklusi sosial hadir untuk menyelesaikan permasalahan dari eksklusi sosial. Oleh karena itu, untuk memahami inklusi sosial perlu dipadahi terlebih dahulu pengertian dari eksklusi sosial atau pengucilan sosial. Jika eksklusi sosial pahami sebagai pengecualian individu tau masyarakat dari berbagai dimensi hidup, inklusi sosial harus memastikan mereka yang beresiko mengalami eksklusi sosial memiliki peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kehidupan. Dari inklusi sosial ini akan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan yang dianggap normal dalam masyarakat tempat mereka tinggal (Milcher e Ivanov, 2008).

Salah satu lembaga yang perlu memperhatikan inklusi sosial adalah perpustakaan. Pada tahun 2015, BAPPENAS meluncurkan kebijakan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kebijakan tersebut diperkuat dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, yang didalamnya menjadikan literasi untuk kesejahteraan sebagai salah satu prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan manusia. Program ini disambut baik oleh Perpustakaan dengan meluncurkan semboyan baru “Pustakawan Berkarya Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Rangka Ikut Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

BAPPENAS memandang perlunya tranformasi layanan perpustakaan masa lalu menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

pengguna perpustakaan. Tujuan dari transformasi perpustakaan adalah; 1) untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, dan 2) untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial memiliki fungsi sebagai berikut; 1) perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan, 2) perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat, 3) perpustakaan menjadi wadah menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat, dan 4) perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (Alhumami, 2018).

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sejalan dengan visi RPTRA. Visi dari RPTRA diantaranya adalah; 1) mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA), 2) Meningkatkan sarana dan prasarana interaksi sosial warga, 3) mengimplementasikan 10 program PKK dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader PKK dan masyarakat, 4) meningkatkan RTH dan penyerapan air tanah, dan 5) meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar RPTRA.

Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan bahwa selama ini RPTRA lebih banyak dikunjungi oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Termasuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan RPTRA lebih banyak diadakan untuk anak-anak. Jika merujuk pada visi RPTRA poin 5 yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar RPTRA, visi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dengan mengoptimalkan perpustakaan RPTRA berbasis inklusi sosial, diharapkan kelima visi RPTRA dapat tercapai sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Kondisi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa Kepulauan Seribu mengalami eksklusi sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan eksklusi sosial, muncullah konsep inklusi sosial. Salah satu lembaga yang perlu memperhatikan penerapan inklusi sosial adalah perpustakaan. Hal ini juga seiring dengan program BAPPENAS yang disambut baik oleh Perpustakaan Nasional, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal ini menjadi peluang bagi perpustakaan RPTRA untuk mengoptimalkan perannya menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial bagi masyarakatnya yang masih mengalami eksklusi sosial. Dengan menerapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tercapainya visi dari RPTRA secara keseluruhan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terhadap masyarakat Pulau Untung Jawa dan informasi yang telah membantu memberikan data untuk penyelesaian artikel ini. Serta untuk Bapak Blasius Sudarsono yang telah mendukung terselesainya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aasland, A. & T. Fløtten. (2001). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia. *Europe-Asia Studies*, 53(7), 1023-1049.
- Alhumami, A. (2018). *Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dalam Mendukung Pencapaian SDGs*. [http://ipi.web.id/wp-content/uploads/2018/10/03\\_KEBIJAKAN-PEMBANGUNAN-PERPUSTAKAAN-BERBASIS-INKLUSI-SOSIAL-DALAM-MENDUKUNG-PENCAPAIAN-SDGs-Kongres-IPI-Surabaya-10-Oktober-2018.pdf](http://ipi.web.id/wp-content/uploads/2018/10/03_KEBIJAKAN-PEMBANGUNAN-PERPUSTAKAAN-BERBASIS-INKLUSI-SOSIAL-DALAM-MENDUKUNG-PENCAPAIAN-SDGs-Kongres-IPI-Surabaya-10-Oktober-2018.pdf) Diakses pada 1 Juni 2019
- Ardiansyah. (2013). *Pengaruh Deprivasi Relatif terhadap Perilaku Agresi pada Anak Jalanan di Lembaga Pemberdayaan Anak Negeri (LPAN) Griya Baca Kota Malang*.
- Ardiansyah, Rizal. (2013). *Pengaruh deprivasi relatif terhadap perilaku agresi pada anak jalanan di Lembaga Pemberdayaan Anak Negeri (LPAN) Griya Baca Kota Malang*. *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. [Etheses.uin-malang.ac.id/1704/5/09410149\\_Bab\\_2\\_pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1704/5/09410149_Bab_2_pdf) Diakses pada 09 Juni 2019
- Badan Pusat Statistik Kepulauan Seribu. 2018. *Kepulauan Seribu dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat

*Statistik*. Jakarta: BPS.

Bungin, B.(2001). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada Pers.

Creswell, J. W. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dean, H. (2016) *Poverty and social exclusion*. In: Platt, Lucinda and Dean, Hartley, (eds.) *Social Advantage and Disadvantage*. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 3-24.

Fourie, Ina. (2007). Public Libraries Addressing Social Inclusion: How We May Think... *World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference And Council 19-23 August 2007, Durban, South Africa*

Gidley, J, Hampson, G, Wheeler, L and Bereded-Samuel, E. 2010. Social Inclusion: Context, Theory, and Practice. *The Australasian Journal of University-Community Engagement*, 5(1), 6-36.

Irsyad, R. E. (2012). *Orang Pulo di Pulau Karang*. Jakarta: Lab Teater Ciputat.

Lloyd, A.,Lipu, S. & Kennan, M. (2010). On Becoming Citizens: Examining Social Inclusion from an Information Perspective. *Australian Academic & Research Libraries*. 41, 42-53.

Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga

Rawal, Nabin. (2008). Social Inclusion and Exclusion: A Review *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 2, 161-180.

Rusaini. (2015). *Konstruksi realitas sosial keistimewaan Yogyakarta dalam wacara politik*. Diambil kembali dari repository.upi.edu: repository.upi.edu/17497/4/D\_PKN\_0908667\_chapter3.pdf

Syahra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, edisi khusus.

World. --. *Social Inclusion* diakses dari <https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion> pada 14 Juni 2019.

Wiguna, DH & Salim, TA. (2018). Child Friendly Integrated Public Space's (RPTRA) Library as a Solution to Enhance Education Quality to Achieve ASEAN Vision 2020. *Congress of Southeast Asian Librarians Napytiaw*, 2-5 May 2018, Napytiaw, Myanmar.